BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan indeks yang diterbitkan Bank Dunia Tahun 2018 tentang tingkat kemudahan berusaha negara-negara, Indonesia berada di peringkat ke-72 *Ease of Doing Business (EoDB)*. Peringkat itu merupakan peningkatan dari ranking sebelumnya yang pada tahun 2017 tercatat di ranking 91 tetapi justru menurun satu tingkat menjadi ke 73. Berdasarkan EoDB tingkat regional, Indonesia masih berada di peringkat ke-6 di antara negara ASEAN setelah Malaysia, Thailand, Brunei, dan Vietnam. Singapura menduduki negara pertama dengan tingkat kemudahan berusaha tertinggi.¹ Peringkat EoDB Indonesia yang masih tergolong rendah perlu ditingkatkan karena akan mempengaruhi berbagai aspek dalam pembangunan ekonomi nasional. *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha.'*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Nawacitanya menetapkan beberapa prioritas pembangunan bidang ekonomi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya²;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Berdasarkan program nawacita yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi itu, maka pembenahan sektor investasi menjadi salah satu solusinya. Dalam dokumen “Capaian 3 Tahun Pemerintahan Joko

¹ Freedy, I. M., dan Saputri, N. K., *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha.'*, (Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018), hal 113

² Asnawi, A., “*Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional*”, Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi, 2(1), (2018), hal. 195-208

Widodo-Jusuf Kalla” dari Kantor Staf Presiden, pemerintah menetapkan empat bagian besar yang masuk dalam aspek ini, salah satunya yakni peningkatan investasi. Sampai saat ini, Pemerintah telah mencabut 9 regulasi dan merevisi 31 regulasi untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketentuan - ketentuan yang menghambat perekonomian. Selain itu, pemerintah juga telah membuat 49 regulasi baru dan menggabungkan 35 regulasi untuk menyederhanakan perizinan dan aturan serta memunculkan 89 regulasi yang mencabut aturan lama agar lebih relevan. Pemerintah juga meluncurkan enam paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan produktivitas, sebagai berikut: (i) Pusat Logistik Berikat (PLB), dan (ii) Kemudahan berusaha bagi UMKM. Hal ini dilakukan dengan memangkas izin, prosedur, waktu, dan biaya dalam 10 indikator kemudahan berusaha³.

3. Revisi Daftar Negatif Investasi.

Pasca penerbitan Perpres No. 44 Tahun 2016, sudah ada 527 perusahaan dengan rencana investasi US\$12.926 miliar yang akan dimanfaatkan dalam berbagai bidang usaha dan investasi, yang terdiri dari: manufaktur, unfrastruktur, pariwisata, pertanian dan aroindustri, pertambangan, properti dan konstruksi⁴.

4. Insentif fiskal.

Tax allowance telah dimanfaatkan 25 perusahaan dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari yang sebelumnya 2 tahun.

5. Layanan Perizinan investasi 3 jam ini sudah dimanfaatkan 284 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 219 triliun dan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 170.657 orang.

6. Pembiayaan ekspor.

Prioritas investasi pada proyek yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan memiliki potensi memperkuat pelaku ekonomi nasional diberikan kepada pengusaha Indonesia. Sementara itu, untuk sektor yang belum

³ Zakaria, R. Y., Wiyono, E. B., Firdaus, A. Y., Suharjo, D., Muhsini, M. A., Salam, R., ... & Agraria, S. R. Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial.

⁴ Wiradarma, I. W., & Westra, I. K., “Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS), Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia”, Kertha Semaya, Vol. 9(1), 2020, hal 78

berkembang dan jarang dimasuki oleh pelaku ekonomi dalam negeri, dibuka hingga sepenuhnya kepada investor asing.

Agar Indonesia semakin menarik bagi investor asing, salah satu tindakan yang baru - baru ini dilakukan adalah mempermudah proses perizinan berusaha dengan memberlakukan Sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24 Tahun 2018) yang diatur lebih lanjut dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pada Pasal 1 Angka 5 PP No. 24 Tahun 2018, OSS didefinisikan sebagai Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. Sistem ini berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat. Sistem OSS merupakan pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebelumnya berlaku. Sistem ini akan menginterkoneksi dan mengintegrasikan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pelayanan perizinan dengan memanfaatkan PTSP.

Pemberlakuan PP No. 24 Tahun 2018 ini tidak lepas dari berbagai masalah yang dikeluhkan oleh para calon investor dan pelaku usaha. Penerbitan peraturan pelaksanaan ini tidak langsung mencabut peraturan daerah yang bertentangan dengan OSS, meskipun ketentuan Pasal 89 mengamanatkan agar Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mencabut atau menyatakan tidak berlaku norma, standar, prosedur, kriteria (NPSK) perizinan berusaha yang tidak sesuai dengan PP. Kondisi ini mendorong kebutuhan perlunya meninjau skema pembagian tugas antara pusat dan daerah dalam bidang perizinan investasi.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan perizinan berusaha, sistem OSS ini merupakan sistem yang baru diberlakukan pada bulan Juni tahun 2018. Pemberlakuan sistem ini mengundang pertanyaan mengenai perbedaan proses perizinan berusaha OSS dengan sistem-sistem yang sudah diberlakukan sebelumnya seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga Sistem

Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Di samping itu, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai lembaga yang bertugas sebagai pelaksana sistem OSS. Dalam pelaksanaannya pengetahuan dan pola pikir masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem ini masih kurang memadai sehingga masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam pemberlakuan sistem OSS secara efektif dan bermanfaat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dan kendala tersebut perlu dikaji dan diberikan solusi yang tepat dan memadai.

Dalam *World Investment Report 2017* yang dirilis oleh *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar dengan urutan ke-4 sebagai tempat investasi yang prospektif di dunia. Posisi Indonesia yang berada persis dibawah Amerika Serikat, China, dan India ini harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan- peraturan di bidang usaha di Indonesia dengan arah yang jelas, yakni menjamin kepastian hukum sehingga peringkat EoDB Indonesia dapat terus meningkat sesuai target Pemerintah pada peringkat ke-40.

1.1.1 Aspek Filosofis

Keadilan merupakan nilai dasar yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Keadilan dalam bidang ekonomi berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya, tanpa memandang status sosial, agama, ras, etnis, atau gender. Kemudahan berusaha merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi. Dengan kemudahan berusaha, maka setiap orang dapat lebih mudah memulai dan mengembangkan kegiatan usahanya di berbagai bidang ekonomi, industri, dan perdagangan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan hidupnya.

OSS merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan OSS, pelaku usaha dapat mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan, efisiensi waktu dan biaya sehingga dapat lebih cepat memulai dan mengembangkan usahanya. Hal ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara lebih

merata, meningkatkan kemakmuran rakyat dan mewujudkan asas keadilan di bidang perekonomian.

1.1.2 Aspek Sosiologis

Penyederhanaan perizinan merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan OSS. Dengan OSS, pelaku usaha dapat mengajukan semua jenis perizinan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usahanya secara elektronik melalui satu portal, yaitu *Online Single Submission* (OSS). Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan, sehingga pelaku usaha dapat lebih cepat memulai usahanya.

Selain peningkatan efisiensi waktu dan biaya, OSS juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses perizinan. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas dan transparan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, serta proses dan mekanisme perizinan yang harus dilalui. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi dalam proses perizinan. Beberapa kasus korupsi dalam bidang perizinan usaha yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti misalnya Bupati Kutai Kertanegara yang menerima suap terkait pemberian izin lokasi PT Sawit Golden Prima pada Desa Muara Kaman seluas 16.000 Ha dan terkait penerbitan SKKL, izin lingkungan dan Amdal⁵. Selain itu, kasus suap penerbitan izin telekomunikasi oleh Bupati Mojokerto, suap perizinan pembangunan proyek Meikarta oleh Bupati Bekasi dan kasus korupsi lainnya menunjukkan masih rentannya perizinan terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai suatu tindak pidana memiliki dampak buruk bagi sumber daya, ekonomi maupun sosial. Sumber daya ekonomi tergerogoti yang ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan munculnya ekonomi bayangan dalam sektor keuangan. Dalam kaitan ini, pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya guna meminimalisasi potensi korupsi pada perizinan mulai dari rangkaian paket kebijakan ekonomi, perizinan terintegrasi, sampai pada

⁵ Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, dan Fachrur Rozi, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal”, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 (2), 2020, hal. 298

diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS)⁶. Penataan perizinan penting untuk dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjadi elemen pendukung dan bukan penghambat dalam usaha. PP No. 24/2018 diterbitkan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan proses penanaman modal dan berusaha sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi praktik korupsi dalam perizinan. Sistem OSS dapat mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dengan aparat pemerintah sehingga dapat meminimalisasi potensi tindakan-tindakan persekongkolan dalam pengurusan perizinan seperti praktik yang terjadi selama ini di Indonesia.

Sebagaimana diulas di atas, OSS juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perizinan. Dengan OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi bolak-balik ke instansi pemerintah untuk mengurus perizinan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh investor dan pelaku usaha yang memiliki minat berbisnis di Indonesia Secara administratif, OSS juga dapat meningkatkan pemerataan dalam proses perizinan. Dengan OSS, pelaku usaha dari seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses layanan perizinan secara terintegrasi, mudah dan merata. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di pusat-pusat perekonomian, pertambangan, industri, dan perdagangan di bidang- bidang usaha tertentu di seluruh wilayah Indonesia.

1.1.3 Aspek Yuridis

Dari segi kebijakan, penerapan OSS diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha beserta bidang-bidang usaha yang terbuka. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus mengetahui secara jelas dan pasti persyaratan perizinan yang harus dipenuhi, serta proses dan mekanisme perizinan yang harus dilalui. Kepastian hukum dalam regulasi perizinan investasi yang lengkap dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berinvestasi

⁶ Nirboyo, A.J., “Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, Jatiswara, Vol. 36(2), 2021, hal. 228

dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Dalam perspektif global, penerapan OSS secara normatif harus bersifat non-diskriminatif. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus diperlakukan sama secara hukum, tanpa memandang status sosial, agama, ras, etnis, atau gender. Non-diskriminasi dapat mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya secara lebih pasti, mandiri dan produktif.

Penerapan OSS harus didasarkan pada beberapa aspek penting, yaitu regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk perundang-undangan terkait investasi dan perdagangan. Hal ini berarti bahwa investor sebagai pelaku usaha mendapatkan transparansi proses perizinan dan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat. Dengan prinsip ini ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung sistem OSS termasuk akses internet dan keamanan data memberikan kemudahan untuk pelaku usaha dan investor mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat disusun rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai OSS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengaturan pelayanan OSS dalam menjamin kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha *lifestyle* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji efektifitas PP No. 24 Tahun 2018 terkait dengan upaya pemerintah mempermudah berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Adapun aspek-aspek yang dikaji meliputi:

1. Penerapan sistem *Online Single Submission* berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

2. Kendala dalam penggunaan *Online Single Submission* bagi investor, dan pelaku usaha berdasarkan Peraturan No. 24 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan bagi mahasiswa tentang Penerapan sistem *Online Single Submission* dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Online Single Submission* bagi investor dan pelaku usaha berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
 - b) Dapat dijadikan referensi dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan maupun pengaturan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan sikap pemerintah untuk lebih meningkatkan peranan pembuatan izin perusahaan melalui OSS sebagai upaya untuk mengurangi kendala penggunaan *Online Single Submission* bagi investor, dan pelaku usaha berdasarkan Peraturan No. 24 Tahun 2018.
 - b) Bagi Mahasiswa
Mahasiswa dapat menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan atau tempat kerja nantinya.
 - c) Bagi Universitas
Dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama atau mengkaji topik yang serupa di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dimana setiap bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada ini merupakan Tinjauan Pustaka penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Pengolahan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas analisis dari hasil penelitian dan rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan analisis dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang dibahas.